

OPINI, JP Radar Jogja, 5 Februari 2004

**Catatan Tambahan untuk Kartini**  
**POLITIK MASUK KAMPUS : TIDAK UNTUK MAHASISWA AN SICH**

Oleh : Halili Hasan

Wacana politik masuk kampus—secara lebih spesifik, melalui kampanye partai politik di kampus—sejatinya sudah berhembus mengisi opini publik sejak awal pertengahan tahun 2002. Namun, tidak tampak *greget* dari pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan wacana ini untuk meresponnya secara lebih serius. Yang dimaksud dalam hal ini tentunya adalah pimpinan atau birokrasi perguruan tinggi dan partai politik. Kendati demikian, politik masuk kampus merupakan wacana yang layak untuk mendapatkan perhatian dan diskursus yang lebih *grounded* mengingat signifikansi implikasinya bagi demokratisasi Indonesia dalam jangka panjang.

Beberapa waktu lalu, Kartini menulis sebuah opini di Harian ini dengan judul *Ketika Politik Masuk Kampus* (Radar Jogja, 30 Januari 2004). Sebuah tulisan yang mencoba mengkaji tentang politik masuk kampus dari pendekatan yuridis-konstitusional yang pada akhirnya mengerucut pada konklusi, politik masuk kampus sangat urgen bagi mahasiswa. Terkait dengan isi tulisan dimaksud, tidak ada yang resisten bahwa berpolitik adalah hak asasi yang mendapatkan proteksi konstitusional, pun, tidak banyak yang menyangkal urgensi politik bagi mahasiswa, namun harus segera ditambahkan ; bukan sekedar untuk mahasiswa, tapi juga bagi masyarakat akademis secara umum (kecuali mahasiswa ; juga dosen dan karyawan). Tulisan ini merupakan tanggapan dan *additional notes* bagi tulisan dimaksud.

Perlu sedikit mendapatkan penegasan, bahwa sejatinya politik selama ini sudah masuk ke kampus-kampus sebagai suatu komponen dari struktur keilmuan, misalnya melalui pendidikan kewarganegaraan (bukan sekedar *kewiraan*, sebagaimana kewajiban edukatif yang didoktrinkan Orde Baru) yang berlaku umum di berbagai perguruan tinggi, apalagi di fakultas-fakultas yang menempatkan politik sebagai objek materia studinya (FISIPOL atau FISIP dengan berbagai program studi yang ada). Sejalan dengan 'kebiasaan' negara-negara yang menganut penerapan sistem demokrasi, dimana politik merupakan bagian dari

kurikulum pendidikan, galibnya dikenal dengan *civic education* (yang kajian mendasarnya terutama mengenai demokratisasi politik) semisal di Amerika atau *political education* seperti di Jerman. Sedangkan, dalam konteks Indonesia, yang sejak dulu 'ditabukan' untuk masuk kampus adalah politik praktis.

### **Urgensi Politik Praktis Bagi Masyarakat Akademik**

Tidak sedikit asumsi yang berkembang tentang politik praktis, negatif ataupun positif. Salah satu dimensi yang menegatifkan politik misalnya asumsi 'politik itu kotor' atau 'tidak ada yang abadi di dalam politik selain kepentingan'. Kedua asumsi tersebut mengilustrasikan 'seakan-akan' di dalam politik praktis, tujuan menghalalkan segala cara, jadi 'tidak baik' untuk masuk kampus. Opini demikian sebenarnya bagian dari upaya indoktrinasi secara sistematis untuk mendepolitisasi masyarakat dan nyaris sukses dilakoni oleh Rezim Orde Baru. Lihatlah bagaimana mahasiswa dilarang untuk 'cawe-cawe' ke dalam urusan politik praktis melalui *policy* NKK/BKK, dan masyarakat luas pun dipangkas hak politiknya dengan kebijakan partai politik tidak boleh 'ada' di kecamatan-kecamatan dan desa-desa. Masyarakat secara sengaja *diset* untuk menjadi apolitis sehingga eksistensi rezim senantiasa 'aman dan terkendali'.

Pasca reformasi, proses depolitisasi rakyat yang dilakukan oleh Rezim Orde Baru berhadapan dengan gelombang *euphoria* atau liberalisasi politik—meminjam istilah Philippe C. Schmitter dalam studi transformasi politik dari sistem otoritarianisme ke demokrasi—yang salah satunya ditandai dengan berkembangnya kebebasan pers, kemerdekaan mengemukakan pendapat di depan umum (*free of expression*), dan fenomena-fenomena politik lain. Sehingga terbangun kesadaran baru tentang pentingnya dimensi-dimensi politik praktis, seperti sosialisasi politik, partisipasi politik, dan pendidikan politik. Transisi demokrasi di Indonesia juga meniscayakan tuntutan keterbukaan politik dan transparansi, karena politik pada dasarnya tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, mengingat secara alamiah manusia adalah *zoon politicon*.

Dalam sudut pandang inilah terdapat begitu besar urgensi politik praktis bagi masyarakat akademik. Bentuk paling praksis dan konkrit dari politik masuk kampus adalah kampanye partai politik di kampus, terutama mendekati Pemilu 2004. Namun demikian, perlu mendapat penekanan bahwa politik masuk kampus

dalam bentuk apapun harus ekuivalen dengan ajektif-ajektif ilmiah dan akademis dunia perguruan tinggi. Kegiatan politik praktis di kampus dengan karakteristik yang relevan, memiliki sisi-sisi positif lebih besar dibandingkan dengan sisi negatif—yang juga ada tentunya—baik ditinjau dari sudut pandang masyarakat akademik maupun parpol sebagai organisasi politik. Dilihat dari perspektif kepentingan masyarakat akademik, politik masuk kampus memiliki beberapa urgensi, antara lain : *Pertama*, politik praktis di kampus merupakan ‘laboratorium’, tidak saja bagi program studi-program studi yang bersinggungan secara langsung dengan ilmu politik, akan tetapi masyarakat kampus secara umum. Masyarakat kampus memiliki kesempatan secara langsung untuk mengamati kegiatan sosialisasi politik, dan melakukan praktek partisipasi politik berupa penyampaian input-input politik.

*Kedua*, sebagai stimulan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat akademik terhadap masalah-masalah politik praktis yang secara riil berkembang dalam fakta-fakta politik dan bukan sekedar wacana. Sekedar catatan, dunia kampus selama ini dipandang ibarat 'menara gading' yang jauh dari akar masyarakat dan jarang bersentuhan dengan permasalahan-permasalahan konkrit. *Ketiga*, kegiatan politik praktis di kampus bisa memberikan salah satu referensi bagi masyarakat akademik untuk melakukan gerakan-gerakan moral dan intelektual dalam upaya transformasi sosio-politis di dalam masyarakat, salah satu contoh yang bisa disebut misalnya, mengatasi masalah penyelewengan kekuasaan elit politik dari koridor aspirasi dan kepentingan rakyat. *Keempat*, politik praktis di kampus memberikan parameter ‘formal’ bagi masyarakat akademik di dalam mengevaluasi relevansi politik *das sollen* (seharusnya) dengan *das sein* (senyatanya).

### **Politik Masuk Kampus bagi Parpol dan Demokratisasi**

Selain bagi masyarakat kampus sendiri, masuknya politik ke kampus-kampus memberikan kontribusi positif bagi partai politik sebagai organisasi politik yang banyak terlibat dalam kompetisi politik melalui kontestasi publik dengan orientasi kekuasaan. 'Menggarap' sosialisasi politik ke kampus-kampus akan mengeratkan *proximity* partai politik dengan masyarakat intelektual. Selama ini masyarakat kampus, khususnya mahasiswa, seringkali dianggap sebagai batu

sandungan bagi kepentingan partai politik, bahkan dianggap sebagai 'momok' yang *medeni*. Di samping itu, dengan 'masuk kampus' ketahanan dan kualitas parpol akan lebih teruji.

Dalam jangka panjang, pergesekan masyarakat akademis dengan realitas politik praktis, akan memberikan implikasi positif bagi pengembangan proses demokratisasi. Masyarakat perguruan tinggi sebagai kelas menengah intelektual dapat berperan di dalam membangun dan mengawal keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas publik. Di beberapa negara demokrasi di dunia, kelas menengah intelektual memiliki andil yang sangat besar di dalam melakukan item-item transformasi menuju demokrasi.

Pemahaman yang *justified* demikian akan menipiskan kekhawatiran bahwa masuknya kegiatan politik akan merusak tatanan kehidupan perguruan tinggi, selama masyarakat kampus sendiri mampu menjaga ajektif ilmiah, kritis, dan independen yang selama ini menjadi jati diri mereka.

Masa-masa seputar Pemilu 2004 merupakan media untuk 'menjajaki' keberanian masyarakat kampus membuka diri bagi kegiatan politik praktis, serta keberanian parpol untuk mengambil inisiatif. Bagaimana probabilitasnya? kita tunggu saja!

*\*) Penulis adalah Ketua Komunitas Studi Kebangsaan (KOSSA) dan Mahasiswa PPKn FIS UNY*